BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 201 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rancabali untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rancabali, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Rancabali untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Rancabali untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Rancabali;
(2) Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Rancabali tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rancabali;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Rancabali dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Rancabali;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Rancabali yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Rancabali digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Rancabali selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Rancabali tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Rancabali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Rancabali menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Rancabali meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Rancabali sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Rancabali dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Rancabali.

Pasal 7

(1) Kecamatan Rancabali membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Rancabali.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Rancabali disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Rancabali tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Rancabali melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Rancabali dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Rancabali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Rancabali terhadap pelaksanaan dan hasil Kecamatan Rancabali.

(3) Camat Rancabali menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Rancabali.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Rancabali dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN RANCABALI

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Rancabali dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rancabali beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Rancabali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Rancabali tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 201

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 201 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
RANCABALI TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Perencanaan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud.

Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (*goals*), tetapi juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan

dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh kalangan. Adapun melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) yang memuat Program dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis PD. Rencana Kerja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD di Kabupaten Bandung, telah Menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (Tahun Anggaran 2026) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana Kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan

akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu bersinergi dengan VISI dan MISI yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan MISI Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Rancabali .

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 Adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115); n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 39).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rancabali
2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara teadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Rancabali , agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja Kecamatan Rancabali , proses penyusunan Renja Kecamatan Rancabali , keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja
1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Rancabali Tahun 2026
1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Rancabali .
1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Rancabali serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

Kecamatan Rancabali Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rancabali
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rancabali
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rancabali
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rancabali
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rancabali
3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Kecamatan Rancabali Tahun Lalu dan Capaian renstra Kecamatan Rancabali

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Rancabali telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Rancabali yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan). Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) disesuaikan dengan hasil input data e-monev pada e-monev yang dimaksudkan agar data yang tersaji menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan obyektif. Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancabali Tahun 2024.

Tabel 2. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancabali
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indicators Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Capaian
Menngkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai IKM	88,59	93,7	105,77

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancabali pada tahun 2024 mencapai 105.77 %. Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2024) sebagaimana pada tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2. 2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,788,110,792.00	4,592,148,288.00	96%	Menunjang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,392,400.00	12,830,000.00	35%	Menunjang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,250,000.00	4,080,000.00	96%	Menunjang

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,590,000.00	2,560,000.00	99%	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,620,000.00	1,320,000.00	81%	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,932,400.00	3,510,000.00	182%	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,000,000.00	1,360,000.00	5%	Menunjang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,806,265,190.00	3,964,609,062.00	104%	Menunjang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,798,190,100.00	3,952,484,062.00	104%	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,741,800.00	3,450,000.00	92%	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,060,000.00	7,480,000.00	244%	Menunjang
Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,273,290.00	1,195,000.00	94%	Menunjang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,615,820.00	5,049,000.00	21%	Menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19,000,000.00	18,000,000.00	95%	Menunjang
Koordinasi dan pelaksaaan sistem informasi kepegawaian	1,260,000.00	1,190,000.00	94%	Menunjang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,260,000.00	1,280,000.00	102%	Menunjang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3,095,820.00	2,579,000.00	83%	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,829,760.00	74,968,000.00	154%	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,985,400.00	1,897,500.00	96%	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,652,160.00	33,766,500.00	172%	Menunjang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	477,200.00	8,460,000.00	1773%	Menunjang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,686,000.00	2,540,000.00	95%	Menunjang
Fasilitasi kunjungan tamu	11,200,000.00	11,200,000.00	100%	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,829,000.00	17,104,000.00	133%	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355,444,380	373,093,418	105%	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,860,000.00	1,860,000.00	100%	Menunjang

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,224,380.00	31,971,818.00	82%	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314,360,000.00	339,261,600.00	108%	Menunjang
Persentse BMD Dalam Kondisi Baik	98,600,000.00	150,688,808.00	153%	Menunjang
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5,960,000	5,870,000	98%	Menunjang
Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,280,000.00	1,235,000.00	96%	Menunjang
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	1,360,000.00	1,320,000.00	97%	Menunjang
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3,320,000.00	3,315,000.00	100%	Menunjang
Pengadaan ,Pemeliharaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintahan	43,340,000.00	150,688,808.00	348%	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,720,000.00	39,936,100.00	126%	Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,420,000.00	1,420,000.00	100%	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,200,000.00	109,332,708.00	1072%	Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	285,221,600.00	379,911,000.00	133%	Menunjang
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18,400,000.00	10,220,000.00	56%	Menunjang
Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8,500,000.00	3,570,000.00	42%	Menunjang
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9,900,000.00	6,650,000.00	67%	Menunjang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	12,530,000.00	28,460,000.00	227%	Menunjang
fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	7,210,000.00	6,700,000.00	93%	Menunjang
Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5,320,000.00	21,760,000.00	409%	Menunjang

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	32,400,000.00	31,550,000.00	97%	Menunjang
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	32,400,000.00	31,550,000.00	97%	Menunjang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	221,891,600.00	309,681,000.00	140%	Menunjang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	221,891,600.00	309,681,000.00	140%	Menunjang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111,488,000.00	59,890,000.00	54%	Menunjang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	105,538,000.00	53,940,000.00	51%	Menunjang
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	91,286,000.00	43,920,000.00	48%	Menunjang
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	14,252,000.00	10,020,000.00	70%	Menunjang
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,950,000.00	5,950,000.00	100%	Menunjang
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,950,000.00	5,950,000.00	100%	Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	78,395,900.00	60,006,000.00	77%	Menunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	51,395,900.00	60,006,000.00	117%	Menunjang
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15,876,000.00	15,856,000.00	100%	Menunjang
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan guna mewujudkan stabilitas Keamanan lokal , Regional dan Nasional	3,039,900.00	20,950,000.00	689%	Menunjang

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32,480,000.00	23,200,000.00	71%	Menunjang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110,097,200.00	120,606,000.00	110%	Menunjang
Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	66,236,000.00	86,728,000.00	131%	Menunjang
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66,236,000.00	86,728,000.00	131%	Menunjang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43,961,200.00	33,878,000.00	77%	Menunjang
Peningkatan Kafasitas Lembaga Kemasyarakatan	11,548,000.00	9,208,000.00	80%	Menunjang
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyyarakat	24,063,200.00	16,320,000.00	68%	Menunjang
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8,350,000.00	8,350,000.00	100%	Menunjang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87,093,000.00	62,800,000.00	72%	Menunjang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87,093,000.00	62,800,000.00	72%	Menunjang
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26,750,000.00	8,500,000.00	32%	Menunjang
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23,500,000.00	29,070,000.00	124%	Menunjang
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36,843,000.00	25,230,000.00	68%	Menunjang
JUMLAH	4,788,110,792.00	4,592,148,288.00	96%	

Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran:

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakanPada capaian Program dan Kegiatan terdapat rata-rata capaian yang melebihi dari target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target yaitu target 1 Kegiatan menjadi 2 Kegiatan yang dilaksanakan.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut
   adalah adanya pada pelayanan KTP dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
   Capaian Kinerja di Kecamatan Rancabali yang secara keseluruhan mencapai 96% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kinerja.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang megalami kerusakan
b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan PublikPerubahan Kebijakan/Aturan Data

Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun 2024 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali dan Pencapaian Renstra Kecamatan Rancabali s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)*

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja hasil program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2				Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4		5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10	dokumen	10	dokumen	2	2	100%	2	14	140%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	2	2	100%	2	11	157%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9	dokumen	9	dokumen	2	2	100%	1	12	133%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	dokumen	7	dokumen	2	2	100%	1	10	143%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	9	dokumen	9	dokumen	1	1	100%	1	11	122%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	1	dokumen	0	0	#DIV/0!	0	1	100%

7.01.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.02.0005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	4	10	200%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	laporan	20	laporan	4	4	100%	1	25	125%
7.01.01.2.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.01.2.03.0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	2	paket	3	paket	1	1	100%	0	4	200%
7.01.01.2.03.0005	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	dokumen	4	dokumen	1	1	100%	1	6	200%
7.01.01.2.03.0006	Kooedinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Lepegawaian	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	38	44	880%
7.01.01.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	296	orang	296	orang	38	38	100%	100	434	147%
7.01.01.2.05.0004	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	100%
7.01.01.2.05.0005	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.05.0010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.06.0003	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.01.2.06.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.06.0009	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	12	18	360%
7.01.01.2.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	100	172	287%
7.01.01.2.07.0006	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	12	18	360%
7.01.01.2.08	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	60	bulan	60	bulan	12	12	100%	1	73	122%
7.01.01.2.08.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah biaya Pengamanan Barang Milik Daerah	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.08.0002	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.01.2.09.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan	5	paket	5	paket	1	1	100%	1	7	140%
7.01.01.2.09.0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	unit	9	unit	1	1	100%	0	10	111%
7.01.01.2.09.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	unit	0	0	#DIV/0!	5	5	500%
7.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	unit	25	unit	5	5	100%	1	31	124%
7.01.02.2.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	7	unit	1	1	100%	89	97	380%
7.01.02.2.01.0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	382	poin	382	poin	74	74	100%	100	555	145%
7.01.02.2.01.0002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	0	%	0	%	100	100	100%	0	100	100
7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	laporan	2	laporan	1	1	100%	1	4	200%

7.01.02.2.02.0002	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan denhgan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	2120%
7.01.02.2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	101%
7.01.02.2.03.0003	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	100	106	120%
7.01.02.2.04	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	101%
7.01.02.2.04.0009	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Pesentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	3	dokumen	3	dokumen	1	1	100%	1	5	167%
7.01.03	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4	dokumen	4	dokumen	1	1	100%	1	6	150%
7.01.03.2.01	fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	101%
7.01.03.2.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.03.2.03.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	200%
7.01.03.2.03.0004	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	101%
7.01.03.2.03.0005	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.04	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	101%
7.01.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	1	7	140%
7.01.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.04.2.01.0002	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	0	%	0	%	100	100	100%	50	150	150%

7.01.04.2.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.04.2.02.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	50	200	200%
7.01.05.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	keluarga	100	keluarga	50	50	100%	100	250	250%
7.01.05.2.01.0008	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	200%
7.01.06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	110%
7.01.06.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.06.2.01.0002	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	100%
7.01.06.2.01.0003	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	laporan	5	laporan	1	1	100%	100	106	120%
7.01.06.2.01.0009	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	200%
7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	100%
7.01.06.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	370	orang	370	orang	100	100	100%	1	471	127%

7.01.06.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.06.3	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	100	106	120%
7.01.06.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	%	0	%	100	100	100%	100	200	200%
7.01.07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	0	%	0	%	100	100	100%	1	101	110%
7.01.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	1	7	140%
7.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa	5	dokumen	5	dokumen	1	1	100%	0	6	120%
7.01.04	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	dokumen	0	dokumen	0	0	100%	0	0	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan kecamatan Rancabali pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), indikator – indikator tersebut merupakan target dari capaian indikator sasaran dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target capaian dan hasil pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Rancabali sebagai sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan kinerja dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian kinerja, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dari hasil kerja dan kinerja perangkat daerah merupakan implementasi dari sebuah perenccanaan. Analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Analisis kinerja pelayanan di kecamatan Rancabali merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 mengenai pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Rancabali .

Tabel 2. 4 T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

No	Indikator SPM /Standar Nasional	Kondisi Kinerja Awal Periode	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kepuasan masyarakat	74%	73,20%	73,40%	73,60%	73,80%	74%	88,56 %	81,95 %	93,70%	74%	75%	capaian realisasi Nilai IKM telah melampaui target sebesar 20,10 % dari nilai target tahun 2024
2	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	60 Poin	60 Poin	60,20 Poin	60,40 poin	60,80 poin	61 poin	65,50 poin	74,80 poin	80,70 poin	80,71 poin	70 poin	capaian realisasi AKIP telah melampaui target sebesar 20,30 poin dari nilai target tahun 2024
3	Prosentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	60%	60,5%	70%	90%	90%	80%	66,5%	86,37%	96%	96,5%	80,1%	capaian realisasi BMD telah melampaui target sebesar 0,6 poin dari nilai target tahun 2024
4	Desa Cepat Berkembang									100%	100%	100%	Capaian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan desa serta pembinaan administrasi desa telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah .

1. Kinerja Kecamatan Rancabali Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rancabali telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a. Melaksanakan pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Rancabali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung No. 137.1/Kep.580.adpem/2018 yang terdiri dari 29 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mandatory dan program Prioritas Bupati Bandung.
b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain:

1. Perizinan
2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
3. Melaksanakan Program Kewilayan
4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

a. Belum optimalnya pelayanan Publik.
b. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat (Delegatif);
c. Belum optimalnya Pelaksanaan Tugas Atributif yang melekat pada Kecamatan

Hambatan :

a. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b. Belum optimalnya dukungan anggaran terhadap kewenangan yang dilimpahkan.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan

terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan .

4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

A. Kekuatan

1) Adanya dukungan anggaran.
2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
4) sinergitas dan soliditas aparatur

B. Kelemahan

1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru.
2) Kapasitas SDM Aparatur
3) Belum optimalnya pembangunan sarana publik yang memadai (RTH)
4) Belum adanya penunjang sarana pelayanan publik yaitu Sarana bermain anak yang merupakan saran penunjang pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5) Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
6) Pengumpulan data pembangunan dari unit kerja belum optimal.

C. Tantangan

1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan.
3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih.
4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang).
5) Jauhnya jarak pelayanan Rancabali – Soreang husunya dalam pelayanan Akte Kelahiran dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan.

D. Peluang

1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting.

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1) Meningkatkan kapasitas sdm aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bandung.
2) Melaksanakan pembinanan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi perundang – undangan kaitan dengan tugas dan fungsi aparatur.
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk setiap bidang dan sub bidang.
5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi kependudukan.
6) Meningkatkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.
7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani pembuatan ktp, kk, perizinan, perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani Melalui Program Inovasi “Karyawan Ngantor di Desa “KARASA” / di lingkungan Rukun Warga.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan.

Tabel 2.10 (T-C.31.)

Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Bandung

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN RANCABALI					KECAMATAN RANCABALI					
	UNSUR KEWILAYAHAN				5,103,116,000.00	UNSUR KEWILAYAHAN				5,567,959,087.00	
	KECAMATAN				5,103,116,000.00	KECAMATAN				5,567,959,087.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai akip	93.7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	61	4,984,649,278.00	
			bmd dalam kondisi baik	98	4,799,416,000.00			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	49.56	4,984,649,278.00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	21,601,000.00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	23,301,000.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5,460,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5,460,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7,439,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7,439,000.00	

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	4,260,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	4,260,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,422,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,422,000.00	
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	510,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1,360,000.00	
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	510,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1,360,000.00	
			Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	4,373,018,400.00			Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	4,373,018,400.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	4,362,170,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	4,362,170,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,338,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,338,400.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	8,510,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	8,510,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	5,960,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	7,375,000.00	

						Perangkat Daerah					
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5,960,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7,375,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	6,810,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	51,986,500.00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	24,700,000.00	
2	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	2,560,000.00	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5,880,000.00	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	3,250,000.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	21,406,500.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	28,502,220.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	137,418,378.00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,985,400.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4,086,800.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	10,304,620.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,465,378.00	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	477,200.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4,602,200.00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	206,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		

5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2,700,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,435,000.00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12,829,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12,829,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2,200,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	18,065,000.00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
3	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1,000,000.00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	18,065,000.00	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1,200,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	308,204,380.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	303,340,000.00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,860,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3,250,000.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	39,224,380.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18,292,000.00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	267,120,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	281,798,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	89	53,120,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	89	70,145,000.00	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	41,470,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	57,105,000.00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1,450,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	2,840,000.00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10,200,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10,200,000.00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	93.75	121,720,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	93.96	255,685,209.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	5,490,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	36,080,000.00	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	5,490,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	36,080,000.00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	16,230,000.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	25,540,000.00	

1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	16,230,000.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	25,540,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100	100,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100	194,065,209.00	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	100,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	194,065,209.00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	44,895,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	109,940,000.00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	5,685,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	32,600,000.00	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	5,685,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	32,600,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100	8,910,000.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100	20,980,000.00	

						Tingkat Kecamatan					
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	4,950,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	17,020,000.00	
1	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	3,960,000.00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	3,960,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	30,300,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	56,360,000.00	
1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	50	5,050,000.00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	50	6,960,000.00	
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	5,050,000.00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	12,480,000.00	
3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	50	5,050,000.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	50	8,680,000.00	

	Berkualitas dan Berdaya Saing		Berkualitas dan Berdaya Saing			Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Berkualitas dan Berdaya Saing			
4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	5,050,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	17,380,000.00	
5	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	5,050,000.00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	5,430,000.00	
6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	5,050,000.00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	5,430,000.00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	56,320,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	57,510,000.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	54,120,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	57,510,000.00	

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	54,120,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	46,160,000.00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	2,200,000.00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	11,350,000.00	
2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	2,200,000.00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	11,350,000.00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	43,326,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	94,644,300.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	43,326,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	94,644,300.00	

1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	15,876,000.00	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	60,639,800.00	
2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	9,450,000.00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	16,004,500.00	
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	18,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	18,000,000.00	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	37,439,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	65,530,300.00	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	37,439,000.00	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	65,530,300.00	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	8,475,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	11,320,000.00	

2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	8,475,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	23,505,000.00	
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	20,489,000.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	30,705,300.00	
4	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang)

Kegiatan musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan perundang – undangan bahwa usulan program kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah desa melalui musrenbang desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas pembangunan di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari desa dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu bidang soial.budaya, bidang ekonomi, dan bidang infrastruktur. Dari hasil musrenbang tersebut didokumentasikan oleh tim musrenbang kecamatan ke dalam daftar skala prioritas kecamatan untuk diusulkan pada musrenbang di tingkat kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari desa yang diusulakan melalui musrenbang kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah, namun demikian karena dibatasi kuota pagu anggaran kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kecamatan. Daftar skala prioritas kecamatan untuk di desa – desa yang disetujui masuk dalam rkp opd/dinas terkait dan rkpd kabupaten bandung dan untuk program kegiatan di kecamatan diolah melalui renstra yang terbagi dalam urusan rutin dan kewilayahan Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan daerah dengan kegiatan musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh dinas teknis terkait. Adapaun usulan musrenbang tahun 2026 sampai saat ini masih dalam proses penginputan di tingkat desa dan menunggu kegiatan musrenbang tingkat kecamatan/kabupaten.

1. Usulan dalam daftar skala prioritas berjumlah usulan : 270
2. Usulan yang telah disetujui dalam forum pd usulan : 124 Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Rancabali .

Tabel 2. 6 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) KECAMATAN RANCABALI UNTUK USULAN DESA REGULER DAN KOMPETITIP TAHUN 2026

Daftar skala prioritas (dsp)					
No	Usulan	Permasalahan	Alamat	Desa	Status
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

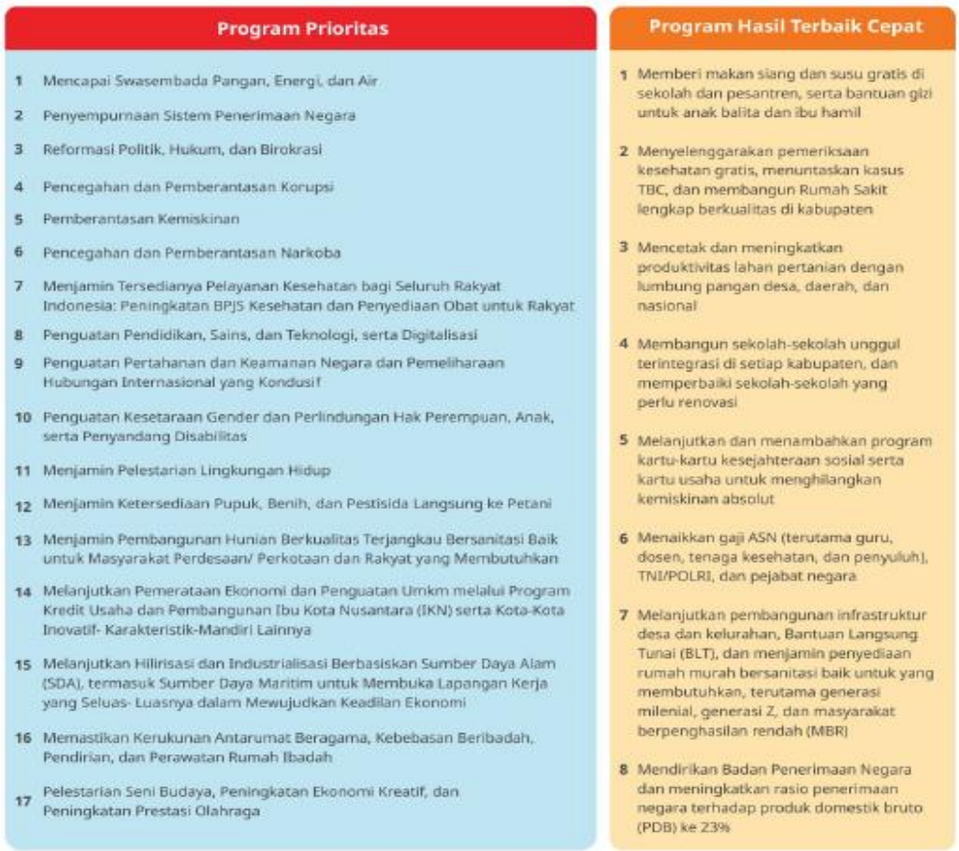
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam memastikan kesinambungan dan akselerasi pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. RPJMN ini dirumuskan dengan pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan teknokratik dan politis, serta bersandar pada kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program Presiden periode 2025–2029.

Visi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, menjadi landasan filosofis penyusunan delapan Asta Cita sebagai misi pembangunan nasional.



Misi tersebut diterjemahkan secara operasional ke dalam 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick

Wins) yang menjadi titik fokus pelaksanaan pembangunan pada lima tahun mendatang.



Gambar 3. 2 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC

Sumber. Perpres 12 Tahun 2025 Lampiran 1

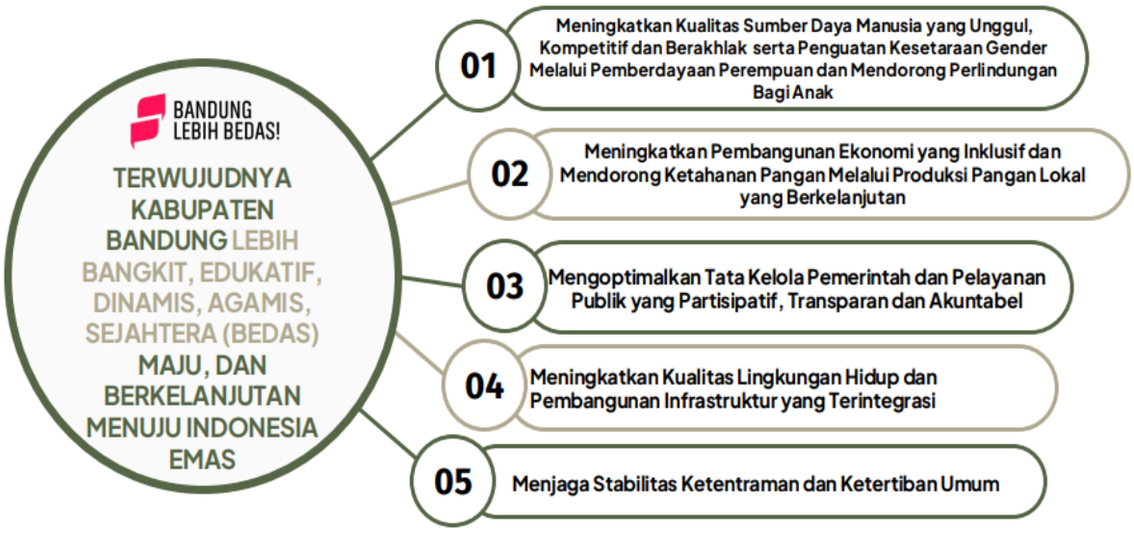
Dalam tataran implementasi, Asta Cita dikembangkan menjadi delapan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi kerangka utama utama



perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha. Setiap prioritas nasional dirancang dengan strategi dan indikator yang terukur guna menjamin keterpaduan pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam periode RPJMD 2025–2029 adalah:



Gambar 3. 2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai religius, kultural, serta berorientasi pada kemajuan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.

Dalam semangat mewujudkan “Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah dengan arah yang lebih terarah, menyeluruh, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan. Visi ini menjadi pijakan utama dalam merumuskan lima misi pembangunan yang saling terintegrasi dan sinergis, guna menghadirkan pemerintahan yang melayani serta pembangunan yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat.

1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak, serta Penguatan Kesetaraan Gender melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

   Misi ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

menjadi prioritas, disertai dengan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, disabilitas, dan lansia.

Tujuan Pembangunan:

Terwujudnya Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak, dan Berdaya Saing

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga serta Pengembangan Potensi Pemuda dan Keolahragaan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
5. Meningkatnya Ketahanan dan Kontribusi Budaya Sunda

2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bandung bertekad mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpihak pada masyarakat. Melalui pemberdayaan UMKM, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan sektor pertanian dan industri kreatif, ekonomi kerakyatan akan menjadi tulang punggung pembangunan.

Tujuan Pembangunan :

Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan
2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah
3. Menurunkan Tingkat Pengangguran
4. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal yang Berkelanjutan

3. Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

Misi ini menekankan pada reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Transformasi digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan integrasi sistem informasi menjadi instrumen kunci.

Tujuan Pembangunan:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran Pembangunan:

Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.

Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan aksesibilitas, serta pelestarian lingkungan. Pemerataan pembangunan antara wilayah desa dan kota menjadi perhatian utama dalam mendukung keberlanjutan daerah.

Tujuan Pembangunan:

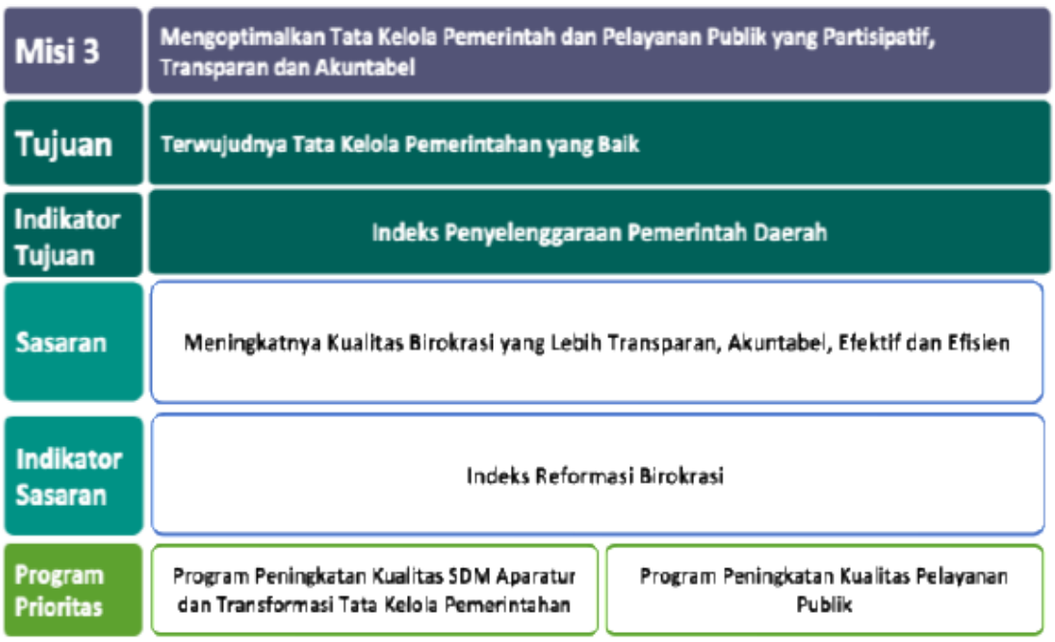
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan

Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif
2. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan
3. Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran
4. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan

5. Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   Stabilitas daerah adalah fondasi pembangunan. Pemerintah daerah berupaya memperkuat ketertiban umum melalui kolaborasi antara aparat, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan guna menciptakan harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan.
   Tujuan Pembangunan:
   Terselenggaranya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Sasaran Pembangunan:
   1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
   2. Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Rancabali sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memastikan terlaksananya program-program pembangunan secara efektif di tingkat wilayah. Seluruh upaya pembangunan yang dilakukan diarahkan untuk selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.



Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Rancabali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Renstra Kecamatan Rancabali disusun dengan mengacu pada peran dan fungsi kecamatan sebagai unit pelayanan administratif dan koordinatif di wilayah, serta memperhatikan dinamika pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Rancabali difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kecamatan, serta dukungan terhadap pembangunan kewilayahan yang merata dan berkelanjutan. Fokus tersebut juga mendukung Misi ke-3 Bupati Bandung, yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.” Kecamatan Rancabali telah

menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rancabali Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target Tahun 2026
			Tujuan	Sasaran	
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Laju Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		0.22
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM	93.96

Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rancabali pada Tahun Anggaran 2026 pda table 3.3 dibawah ini.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
- Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksanannya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7.01.03.2.06.0008 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan		7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
				Terlaksananya urusan pelimpahan kepada camat yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksanannya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Umum Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Administrasi BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Umum Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi dan visi Kabupaten Bandung dengan ke 4, yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. dengan gerakan Sabilulungan sebagai semangat gotong - royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancabali dalam perencanaan Tahun 2026 akan melaksanakan 6 Program dan 17 kegiatan antara lain: Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2026 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Rancabali dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Rancabali pada Tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Staff harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

Tabel T-C 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bandung

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026(TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
Urusan/Unsur	Bidang Urusan/Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							KECAMATAN RANCABALI						
7							UNSUR KEWILAYAHAN		5,567,959,087.00				5,202,410,000.00
7	01						KECAMATAN		5,567,959,087.00				5,202,410,000.00
7	01	01			Indeks Reformasi Birokrasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61	4,984,649,278.00	Pendapatan Asli Daerah		62	4,799,416,000.00
					Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah			49.56	4,984,649,278.00	Pendapatan Asli Daerah		49.57	4,799,416,000.00
7	01	01	2.01		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	kec.rancabali	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	23,301,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	21,601,000.00
7	01	01	2.01	0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec.rancabali	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5,460,000.00	Pendapatan Asli Daerah		2	5,460,000.00
7	01	01	2.01	0002	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kec.rancabali	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7,439,000.00	Pendapatan Asli Daerah		2	7,439,000.00
7	01	01	2.01	0004	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	kec.rancabali	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	4,260,000.00	Pendapatan Asli Daerah		2	4,260,000.00
7	01	01	2.01	0006	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec.rancabali	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,422,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	3,422,000.00
7	01	01	2.01	0008	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	kec.rancabali	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	510,000.00

7	01	01	2.01	0009	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	kec.rancabali	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1	1,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	510,000.00
7	01	01	2.02		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	kec.rancabali		100	4,373,018,400.00	Pendapatan Asli Daerah		100	4,373,018,400.00
7	01	01	2.02	0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kec.rancabali	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	228	4,362,170,000.00	Pendapatan Asli Daerah		228	4,362,170,000.00
7	01	01	2.02	0005	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kec.rancabali	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,338,400.00	Pendapatan Asli Daerah		1	2,338,400.00
7	01	01	2.02	0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	kec.rancabali	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	8,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah		4	8,510,000.00
7	01	01	2.03		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	kec.rancabali	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	7,375,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	5,960,000.00
7	01	01	2.03	0006	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	kec.rancabali	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7,375,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	5,960,000.00
7	01	01	2.05		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	kec.rancabali	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	51,986,500.00	Pendapatan Asli Daerah		100	6,810,000.00
7	01	01	2.05	0002	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	kec.rancabali	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	24,700,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	1,000,000.00
7	01	01	2.05	0005	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	kec.rancabali	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5,880,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	2,560,000.00
7	01	01	2.05	0010	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kec.rancabali	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	21,406,500.00	Pendapatan Asli Daerah		38	3,250,000.00
7	01	01	2.06		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	kec.rancabali	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	137,418,378.00	Pendapatan Asli Daerah		100	28,502,220.00
7	01	01	2.06	0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	4,086,800.00	Pendapatan Asli Daerah		1	1,985,400.00
7	01	01	2.06	0002	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	100,465,378.00	Pendapatan Asli Daerah		1	10,304,620.00

7	01	01	2.06	0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	4,602,200.00	Pendapatan Asli Daerah		1	477,200.00
7	01	01	2.06	0005	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1		Pendapatan Asli Daerah		1	206,000.00
7	01	01	2.06	0008	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	kec.rancabali	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,435,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	2,700,000.00
7	01	01	2.06	0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kec.rancabali	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12,829,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	12,829,000.00
7	01	01	2.07		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kec.rancabali	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	18,065,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	2,200,000.00
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	kec.rancabali	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pendapatan Asli Daerah			-
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	kec.rancabali	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pendapatan Asli Daerah			-
7	01	01	2.07	0005	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	kec.rancabali	Pengadaan Mebel	`	18,065,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	1,000,000.00
7	01	01	2.07	0006	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	kec.rancabali	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1		Pendapatan Asli Daerah		1	1,200,000.00
7	01	01	2.08		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.rancabali	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	303,340,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	308,204,380.00
7	01	01	2.08	0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kec.rancabali	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3,250,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	1,860,000.00
7	01	01	2.08	0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1	18,292,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	39,224,380.00
7	01	01	2.08	0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	kec.rancabali	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	281,798,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	267,120,000.00
7	01	01	2.09		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	kec.rancabali	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89	70,145,000.00	Pendapatan Asli Daerah		89	53,120,000.00

7	01	01	2.09	0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kec.rancabali	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	57,105,000.00	Pendapatan Asli Daerah		5	41,470,000.00
7	01	01	2.09	0006	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	kec.rancabali	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	2,840,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	1,450,000.00
7	01	01	2.09	0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	kec.rancabali	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	10,200,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	10,200,000.00
7	01	02			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	kec.rancabali	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93,96	255,685,209.00	Pendapatan Asli Daerah		94,18	121,720,000.00
7	*01*	*02*	*2.01*		*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	kec.rancabali	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan* *Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*100*	36,080,000.00	Pendapatan Asli Daerah		*100*	5,490,000.00
7	*01*	*02*	*2.01*	*0002*	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	kec.rancabali	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*1*	36,080,000.00	Pendapatan Asli Daerah		*1*	*5,490,000.00*
7	01	02	2.03		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec.rancabali	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	25,540,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	16,230,000.00
7	01	02	2.03	0001	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kec.rancabali	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	25,540,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	16,230,000.00
7	01	02	2.04		Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	kec.rancabali	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	194,065,209.00	Pendapatan Asli Daerah		100	100,000,000.00
7	01	02	2.04	0003	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec.rancabali	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	194,065,209.00	Pendapatan Asli Daerah		1	100,000,000.00
7	01	03			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	kec.rancabali	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	109,940,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	44,895,000.00

7	01	03	2.01		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kec.rancabali	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	32,600,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	5,685,000.00
7	01	03	2.01	0003	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kec.rancabali	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	32,600,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	5,685,000.00
7	01	03	2.03		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	kec.rancabali	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	20,980,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	8,910,000.00
7	01	03	2.03	0004	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kec.rancabali	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	17,020,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	4,950,000.00
7	01	03	2.03	0005	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kec.rancabali	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	3,960,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	3,960,000.00
7	01	03	2.06		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kec.rancabali	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	56,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	30,300,000.00
7	01	03	2.06	0001	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	kec.rancabali	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	50	6,960,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00
7	01	03	2.06	0003	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	kec.rancabali	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	12,480,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00
7	01	03	2.06	0006	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kec.rancabali	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	8,680,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00
7	01	03	2.06	0007	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kec.rancabali	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	17,380,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00

7	01	03	2.06	0008	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	kec.rancabali	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	5,430,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00
7	01	03	2.06	0011	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	kec.rancabali	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	5,430,000.00	Pendapatan Asli Daerah		50	5,050,000.00
7	01	04			Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	kec.rancabali	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	57,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	56,320,000.00
7	01	04	2.01		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec.rancabali	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	57,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	54,120,000.00
7	01	04	2.01	0001	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kec.rancabali	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	46,160,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	54,120,000.00
7	01	04	2.02		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kec.rancabali	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	11,350,000.00	Pendapatan Asli Daerah		100	2,200,000.00
7	01	04	2.02	0001	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	kec.rancabali	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	11,350,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	2,200,000.00
7	01	05			Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	kec.rancabali	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	94,644,300.00	Pendapatan Asli Daerah		100	43,326,000.00
7	01	05	2.01		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kec.rancabali	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	94,644,300.00	Pendapatan Asli Daerah		100	43,326,000.00
7	01	05	2.01	0002	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kec.rancabali	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	60,639,800.00	Pendapatan Asli Daerah		100	15,876,000.00

7	01	05	2.01	0007	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kec.rancabali	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	16,004,500.00	Pendapatan Asli Daerah		1	9,450,000.00
7	01	05	2.01	0008	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec.rancabali	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	18,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	18,000,000.00
7	01	06			Persentase desa yang dibina dan diawasi	kec.rancabali	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	65,530,300.00	Pendapatan Asli Daerah		100	136,733,000.00
7	01	06	2.01		Persentase desa yang dibina dan diawasi	kec.rancabali	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	65,530,300.00	Pendapatan Asli Daerah		100	136,733,000.00
7	01	06	2.01	0002	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec.rancabali	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	11,320,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	7,795,000.00
7	01	06	2.01	0003	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec.rancabali	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	23,505,000.00	Pendapatan Asli Daerah		1	8,475,000.00
7	01	06	2.01	0009	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec.rancabali	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	30,705,300.00	Pendapatan Asli Daerah		1	20,489,000.00
7	01	06	2.02	0010	jumlah dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	kec.rancabali	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1		Pendapatan Asli Daerah		4	99,974,000.00

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Rancabali Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Tabel 4.1

Perubahan Ahir Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026(TAHUN RENCANA)		
			Target Capaian Kinerja	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2	3	4	5	6	7
KECAMATAN RANCABALI					
UNSUR KEWILAYAHAN				5,567,959,087.00	
KECAMATAN				5,567,959,087.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	61	4,984,649,278.00	Pendapatan Asli Daerah
		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	49.56	4,984,649,278.00	Pendapatan Asli Daerah
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kec.rancabali	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	23,301,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5,460,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kec.rancabali	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7,439,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kec.rancabali	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	4,260,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec.rancabali	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	3,422,000.00	Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	kec.rancabali	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah
	kec.rancabali	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	4,373,018,400.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec.rancabali	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	4,362,170,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kec.rancabali	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,338,400.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	kec.rancabali	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	8,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	kec.rancabali	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100	7,375,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	kec.rancabali	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	7,375,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kec.rancabali	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100	51,986,500.00	Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	kec.rancabali	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	24,700,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5,880,000.00	Pendapatan Asli Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kec.rancabali	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38	21,406,500.00	Pendapatan Asli Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec.rancabali	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100	137,418,378.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kec.rancabali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4,086,800.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec.rancabali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,465,378.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	kec.rancabali	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4,602,200.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kec.rancabali	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	kec.rancabali	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,435,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kec.rancabali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12,829,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kec.rancabali	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	18,065,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kec.rancabali	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kec.rancabali	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Mebel	kec.rancabali	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	`	18,065,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec.rancabali	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		Pendapatan Asli Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.rancabali	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	303,340,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kec.rancabali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3,250,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec.rancabali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	18,292,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec.rancabali	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	281,798,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.rancabali	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	89	70,145,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kec.rancabali	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	57,105,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kec.rancabali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	2,840,000.00	Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH I				4,984,649,278.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec.rancabali	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10,200,000.00	Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kec.rancabali	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	93.96	255,685,209.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kec.rancabali	*Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*100*	36,080,000.00	Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kec.rancabali	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*1*	36,080,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec.rancabali	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	25,540,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	25,540,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec.rancabali	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan	100	194,065,209.00	Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec.rancabali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	194,065,209.00	Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec.rancabali	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	109,940,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kec.rancabali	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	32,600,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kec.rancabali	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	32,600,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kec.rancabali	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100	20,980,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kec.rancabali	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	17,020,000.00	Pendapatan Asli Daerah

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kec.rancabali	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	3,960,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kec.rancabali	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	56,360,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	50	6,960,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	12,480,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	8,680,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	17,380,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50	5,430,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	kec.rancabali	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	5,430,000.00	Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kec.rancabali	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100	57,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec.rancabali	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	57,510,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kec.rancabali	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	46,160,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kec.rancabali	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	11,350,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	kec.rancabali	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	11,350,000.00	Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec.rancabali	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100	94,644,300.00	Pendapatan Asli Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kec.rancabali	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	94,644,300.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	kec.rancabali	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	60,639,800.00	Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1	16,004,500.00	Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	18,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kec.rancabali	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	65,530,300.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec.rancabali	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	65,530,300.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec.rancabali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	11,320,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec.rancabali	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	23,505,000.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec.rancabali	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	30,705,300.00	Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	kec.rancabali	jumlah dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH II				*583,309,809.00*	
JUMLAH I+II				5,567,959,087.00	

BAB V

P E N U T U P

Rancangan akhir rencana kerja kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Rancabali maupun nasional.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Rancabali dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026. Dengan disusunnya Rancangan Akhir renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan kantor kecamatan Rancabali dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi kabupaten bandung.

Soreang, Juli 2025

CAMAT RANCABALI

Ttd

KANKAN TAUFIK B

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pemerintah
KabupatenBandung

BUPATI BANDUNG

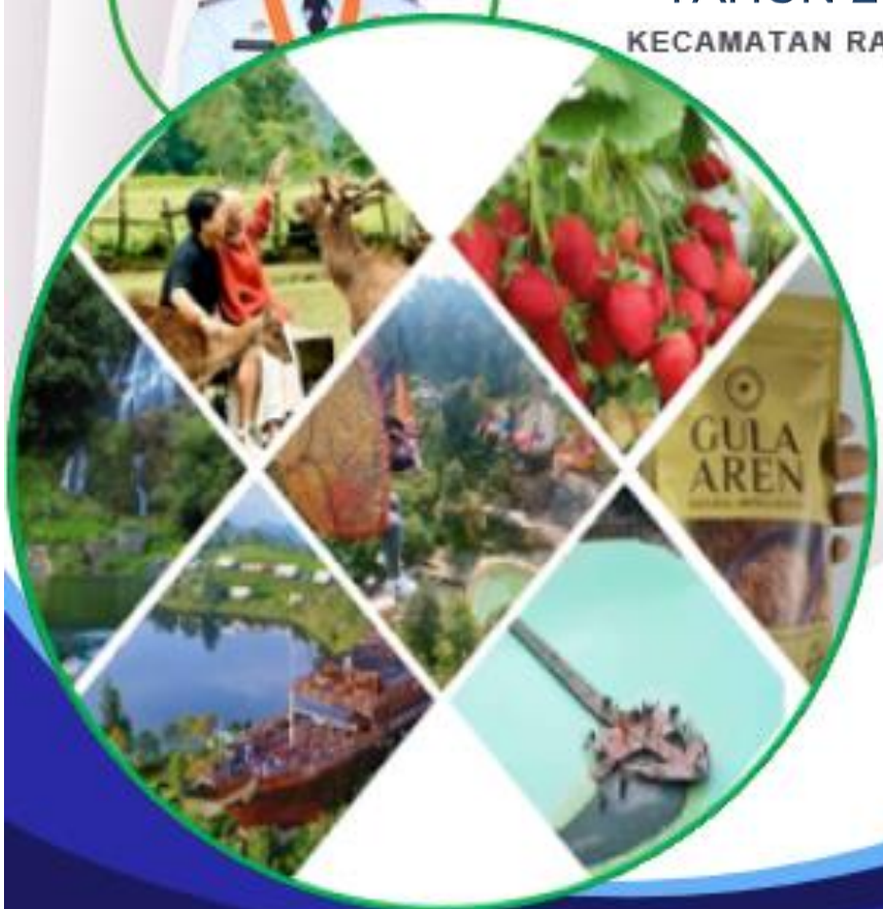
PERATURAN



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2026

KECAMATAN RANCABALI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Yang Maha Kuasa Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat yang tak terihingga kepada kita, dan semoga shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada jungjunan kita Nabi Besar Muhammad SAW termask kita selaku umatnya, dan semoga pula Allah SWT memberikan petunjuk, Hidayah serta inayahnya untukKita sekalian agar dapat menjalakan aktifitas dengan sehat.

Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi Perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 ini disusun berdasarkan kebutuhan yang disusun setelah dilakukan analisis real kebutuhan untuk tahun 2026 dan Rencana Kerja ini merupakan sebuahproses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalakan program dan kegiatan di Kecamatan Rancabali.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkunganorganisasi, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Rancabali sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya

penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan

Misi kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan, kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindungan-Nya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Rancabali, 01 Juli 2025

Camat Rancabali

KANKAN B.,S.Ip
Pembina, IV/a
NIP.19880724 200701 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL II
KATA PENGANTAR i
BAB I 1
PENDAHULUAN.....12
1.1. LatarBelakang.....12
1.2. Landasan Hukum.....12
1.3. Maksud danTujuan.....15
SistematikaPenulisan.....15
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 17
2.1. Evaluasi Renja Kecamatan Rancabali Tahun Lalu dan Capaian RenstraKecamatan.....17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....29
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah...30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan (Musrenbang).....44
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....46
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan.....48
3.3. Program dan Kegiatan.....68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....79
BAB V P E N U T U P.....89
Lampiran lampiran :
1. Kata Pengantar
2. SK Tim Penyusun Renja Tahun 2026
3. SK Penetapan Renja Tahun 2026
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rancabali Tahun 2024 17

Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024.....17

Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali danPencapaian Renstra Kecamatan Rancabali s/dTahun2024(tahun berjalan)*.....22

Tabel 2.4T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.....29

Tabel 2.10 (T-C.31.) Review terhadap Rencana Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Bandung.....33

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rancabali Tahun 2026.....51

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026.....52

Tabel T-C 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....69

Tabel 4.1 Perubahan Ahir Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2026.....80

`

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCABALI
Jalan Raya Patengan No, 83 Telp/Fax. (022) 85924152 Rancabali 40973
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Alamat Email : kec_rancabali@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 000.7.2/Kep.34-Kec/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT RANCABALI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , terkait dengan kewajiban setiap SKPD untuk membuat Rencana Kerja Perubahan Perubahan sebagai acuan perencanaan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) ke depan, maka untuk penyusunannya perlu dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabali tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

17. Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 Perubahan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 dengan dasar dari Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan/ perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Rancabali

Pada Tanggal : Juli 2025

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.I

NIP.19880724 200701 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 000.7.2/Kep.34-Kec/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2026

DAFTAR KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

Penanggungjawab : Camat Rancabali

Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Rancabali

Anggota Tim Pelaksana

: 1. Kepala Seksi Pemerintahan
: 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
: 3. Kepala Seksi Sosial Budaya
: 4. Kepala Seksi Pembangunan
: 5. Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum
: 6. Kepala Sub Bagian Program dan keuangan
: 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.IP
NIP.19880724 200701 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN RANCABALI
Jalan Raya Patengan No, 83 Telp/Fax. (022) 85924152 Rancabali 40973
Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
Alamat Email : kec_rancabali@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABALI

Nomor : 800/Kep 35-Kec/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN RANCABALI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT RANCABALI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat daerah;

Memperhatikan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabali tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Tahun 2014;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;

17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lemba-ran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017

29. Rencana Strategis Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029 Perubahan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dan Rancangan Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2016 - 2019, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja SKPD 2021 oleh Bidang Perencanaan Bappeda, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan , BAB V Penutup, yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Belanja yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD Kabupaten Bandung ;

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Rancabali dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD Kabupaten Bandung;

KELIMA : Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM : Rencana Kerja Kecamatan Rancabali Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh Camat Rancabali dijadikan dasar penyusunan RKA Kecamatan Rancabali tahun 2026.

KETUJUH : Rencana Kerja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rancabali tahun ke-2, seiring dengan Renstra Kecamatan Rancabali Tahun 2025-2029.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan di : Rancabali

Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Camat Rancabali

KANKAN TAUFIK B., S.IP

NIP. 19880724 200701 1 002

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja PerubahanPerangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Penyiapan data dan informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten				
4	Mengkaji hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah				
6	Penelaahan Rancangan Rencana Kerja RKPD				
7	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8	Penelaahan usulan masyarakat.				
9	Perumusan kegiatan prioritas.				
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan				
10.b	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.c	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten sesuai surat edaran bupati.				
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju				
14	Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan.				